

SEJARAH MUNCULNYA PEMIKIRAN PENDIDIKAN MERDEKA KI HAJAR DEWANTARA TAHUN 1922 - 1942

Arif Perwira Dhani^{1*}, Daya Negri Wijaya¹, Marjono²

¹PPG, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Indonesia

²Universitas Jember, Jl. Kalimantan No. 37, Jember, Indonesia

*Corresponding author, email: arif.perwira.2331737@students.um.ac.id

doi: 10.17977/um063.v4.i3.2024.1

Kata kunci

Ki Hajar Dewantara
Gagasan Pendidikan
Pendidikan colonial
Filsafat sejarah

Abstrak

Artikel ini menguraikan faktor-faktor penyebab munculnya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Pendidikan Merdeka pada tahun 1922-1942. Hal ini berasal dari ketidakpuasan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan pemerintah kolonial sehingga mendorongnya merumuskan gagasan-gagasannya sendiri mengenai pendidikan yang ideal. Selain itu, artikel ini menjelaskan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dipengaruhi para pelopor pendidikan seperti Maria Montessori, Frederich Frobel, dan Rabindranath Tagore. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mengenai sejarah Ki Hajar Dewantara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah melalui empat tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Artikel ini menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan dan hermeneutika. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa, pemikiran Ki Hajar Dewantara terbentuk melalui dialektika kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat Hindia Belanda saat itu. Atas dasar itu, Ki Hajar Dewantara merumuskan Pendidikan Merdeka yang bertujuan untuk memerdekakan anak secara individu dan bermasyarakat.

1. Pendahuluan

Sistem pendidikan nasional Indonesia sekarang tidak dapat dipisahkan dari tokoh-tokoh pendidikan terdahulu seperti Ahmad Dahlan, R.A Kartini, R.A Lasmingrat, Rohanna Kudus, Dewi Sartika, dan bapak pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Pemikiran para tokoh tersebut merupakan kritik terhadap kondisi sosial di Hindia Belanda. Kondisi politik pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda sedang mengalami perubahan dengan ditandainya berubahnya model penjajahan kolonial Belanda dari imperialisme dan merkantilisme menuju liberalisme dengan motif kapitalisme (Oktavianuri, 2018; Niel: 2009). Disisi lain, berkuasanya partai Liberal pada parlemen Belanda juga mempengaruhi arah kebijakan kolonial Hindia Belanda. Kaum liberal Belanda mengusung prinsip kebebasan dan persamaan derajat memunculkan keinginan untuk mensejahterakan daerah jajahannya (Niel, 2009). Van Deventer sebagai salah satu tokoh partai Liberal menjelaskan, kesejahteraan rakyat Hindia Belanda dapat dilakukan melalui bidang pendidikan, irigasi, dan transmigrasi (Kartodirdjo, 2018). Kondisi politik- ekonomi tersebut menyebabkan meningkatnya bidang pendidikan rakyat pribumi.

Pendidikan kolonial masa itu memiliki ciri-ciri pokok yaitu bersifat gradual, diskriminatif, dan dualistik sesuai dengan arahan negeri induk Belanda. Gradualisme mempunyai arti bahwa pemerintah Belanda berusaha memperlambat penyediaan pendidikan bagi masyarakat bumiputra (Heru, 2014). Usaha tersebut dilakukan pemerintah Belanda karena menguntungkan dari segi sosial dan ekonomi bagi pemerintah. Terbatasnya kesempatan orang bumiputra dalam menempuh pendidikan berarti juga terjaganya status quo masyarakat Belanda serta dapat dilakukan alih fungsi anggaran pendidikan ke sektor lainnya seperti pembangunan (Nasution, 2015). Selain itu dualisme dalam bidang pendidikan terwujud dalam deferensiasi yang berdasar golongan rasial dan sosial. Diskriminasi sosial tersebut membuat adanya perbedaan kesempatan dalam mengenyam pendidikan sehingga pendidikan dibedakan menjadi dua kategori yaitu untuk anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi.

Kondisi pendidikan anak-anak di Hindia Belanda awal abad ke-20 berorientasi pada prinsip warna kulit dan diskriminasi sosial. Akibatnya, sekolah-sekolah didirikan menurut jenis dan tingkatan status sosial masyarakat Hindia Belanda, yakni *Hollandsch-Chineesche School* (HCS), *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), dan Sekolah Dasar Kelas Satu dan Dua. Golongan Eropa, Timur Asing, dan priyayi akan memasuki Sekolah Dasar Kelas Satu (*De Eerste Klasse School*) sedangkan anak-anak pribumi akan memasuki Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Tweede Klasse School*) dengan muatan materi yang berbeda (Leo, 2012; Daliman, 2012). Penggolongan sekolah tersebut didasarkan pada kepentingan dan tujuan pendidikan pemerintah Belanda.

Pembangunan infrastruktur masa tanam paksa membuat tujuan pendidikan untuk membentuk tenaga kerja kasar pabrik-pabrik dan kantor pemerintah Belanda. Pendidikan diarahkan sesuai kebutuhan dan kepentingan pemerintah kolonial melalui pengajaran nilai-nilai, pemilihan kurikulum, buku teks, seragam sekolah, strategi pengajaran, bahasa pengantar, dan arsitektural sekolah (Suwignyo, 2020). Alhasil anak-anak yang bersekolah di Sekolah Kelas Dua lulusannya terbatas sebagai pekerja kasar, tenaga administrasi, tenaga teknis, dan tenaga pertanian kelas dua dikarenakan materi pengajaran yang didapatkan berupa aritmatika dasar dan bahasa daerah atau bahasa Melayu. Sedangkan Sekolah Kelas Satu mendapatkan pendidikan lebih baik daripada Sekolah Kelas Dua terutama pelajaran berhitung, ilmu sosial, dan pengajaran bahasa Belanda (*Niederländisch-Indien*, 1895; Niel, 2009; Daliman 2012). Sehingga lulusan sekolah ini memiliki kemampuan intelektual dan kecakapan yang berbeda dari masyarakat pribumi lainnya.

Dalam buku Robert Van Niel yang berjudul "Munculnya Elit Modern", pendidikan kolonial telah mengambil peranan penting dalam sejarah perjuangan bangsa, dinamika gerakan pendidikan bisa dilihat dari masa munculnya politik etis pada tahun 1901 sampai dengan berakhirnya masa pendudukan Belanda. Pendidikan kolonial perlahan melahirkan kesadaran rakyat pribumi dan inisiatif membentuk organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, *Indische Partij* (Daliman, 2012). Selain itu, kesadaran ini mendorong munculnya sekolah-sekolah yang didirikan oleh kaum pribumi dengan corak kebangsaan maupun keagamaan seperti *Montessori scholen*, *Muhammadiyah*, *Serekat Rakyat*, *Taman Siswa*, *Kartini Fonds*, dll (Suwignyo, 2020; Agung, 2012). Sekolah-sekolah tersebut memiliki cita-cita dan sistem pendidikan yang berbeda dari pemerintah Belanda. Akan tetapi, sistem pengajaran, bentuk sekolah, dan buku-buku yang diajarkan berasal dari Belanda melalui proses penerjemahan (Agung, 2012). Hal ini terjadi karena daya cipta mengenai model pendidikan yang sesuai dengan Indonesia masih belum muncul. Baru pada tahun 1922 muncul gagasan pendidikan kerakyatan oleh Ki Hajar Dewantara dengan gerakan *Taman Siswa*.

Suwardi Soerjoningrat atau Ki Hajar Dewantara melalui tulisannya terus memproklamasikan akan pentingnya kemerdekaan manusia sebagai tujuan dari pendidikan. Tulisan-tulisannya tentang penyadaran masyarakat menjadi masalah bagi pemerintah kolonial (Niel, 2009). Tulisan Ki Hajar Dewantara secara garis besar berisikan gagasan pendidikan nasional, pendidikan untuk anak-anak, pendidikan keluarga, politik pendidikan, kebudayaan dalam pendidikan, ilmu psikologi, pendidikan moral, dan pengajaran bahasa dapat menumbuhkan semangat nasionalisme rakyat pribumi (Dewantara, 1977). Gagasan Pendidikan Merdeka pertama kali dimuat dalam majalah *Wasita* tahun 1928, mengenai definisi dan tujuan Pendidikan Merdeka berupa sebuah tuntunan terhadap sifat alamiah anak (Dewantara, 1977; Dewantara, 1930). Dikarenakan pendidikan kolonial memiliki maksud dan tujuannya sendiri dalam pengajarannya yang jauh dari kemerdekaan. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara merumuskan pengajarannya yang sesuai dengan kondisi rakyat pribumi. *Taman Siswa* oleh Ki Hajar Dewantara dijadikan poros utama dalam menyediakan pendidikan untuk rakyat pribumi maupun menyebarkan gagasan-gagasannya melalui majalah-majalah terbitan *Taman Siswa*.

Sejumlah penelitian telah mengkaji mengenai dinamika pendidikan kolonial Belanda abad ke-20 di Indonesia. Namun, peneliti memiliki fokus kajian terhadap terbentuknya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disebabkan oleh kondisi sosio-ekonomi Indonesia saat itu. Hal ini dilakukan peneliti karena masih tidak banyak yang melakukan kajian mengenai terbentuknya pemikiran seseorang, terutama Ki Hajar Dewantara.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah melalui empat tahapan (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi). Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan, dan menemukan sumber berupa buku, arsip pemerintah, jurnal, majalah, koran, dan undang-undang yang relevan

dengan topik “Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Pendidikan Merdeka Tahun 1922-1942”. Langkah kedua dengan mengkritik sumber yang ditemukan di atas baik secara ekstern maupun intern (Kuntowijoyo, 2013) Pada tahap kritik ekstern dilakukan dengan mencari tahu kredibilitas dan keaslian sumber secara fisik, sedangkan kritik intern dilakukan dengan melakukan perbandingan pada sumber-sumber yang ditemukan untuk memperoleh informasi yang akurat (Kuntowijoyo, 2013). Penelitian mengenai munculnya pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diketahui dengan melakukan interpretasi pokok pikiran Pendidikan Merdeka melalui sintesis latar belakang pemikiran dan kondisi sosial kolonial. Penulisan ini menggunakan pendekatan sosiologi-pengetahuan dan teori hermeneutika untuk memudahkan peneliti dalam mencari sintesis kemunculan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Langkah terakhir adalah kegiatan menyajikan hasil telaah mengenai berbagai sumber tentang Ki Hajar Dewantara dan kondisi sosio-kultural Hindia Belanda abad ke-20 dalam bentuk tulisan yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Struktur Sosial Masyarakat Hindia Belanda 1922-1942

Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda mengalami perubahan signifikan pada pola kehidupan ekonomi terhadap perkembangan sosial masyarakat. Perubahan tersebut tidak lagi semata-mata didasarkan pada perbedaan warna kulit, melainkan juga bergantung pada faktor ekonomi, status sosial, dan tingkat pendidikan (Kartodirjo, 2018; Meer, 2017: 188). Perubahan tersebut membuat jurang kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat di Hindia Belanda semakin dalam (Hoogerforst, 2017). Fenomena ini khususnya berlaku bagi golongan pribumi yang masih mempertahankan tradisi dan norma-norma yang telah berlaku sebelumnya.

Norma kehidupan di Jawa umumnya mencerminkan sistem patriarki dan budaya yang dominan. Kalangan priyayi atau bangsawan Jawa memberikan hak istimewa kepada laki-laki untuk mengakses pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial yang lebih baik (Hoogervorst, 2017: 450). Keistimewaan ini memungkinkan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan yang layak di Sekolah Angka Satu atau HIS (Daliman, 2012). Selain itu, golongan priyayi juga akan mendapatkan pengajaran mengenai budi pekerti dan budayanya.

Pengajaran nilai-nilai dalam budaya Jawa ditanamkan melalui kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Meskipun begitu, masyarakat Jawa justru menjunjung nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-harinya, terutama bagi kalangan priyayi seperti lingkungan Ki Hajar Dewantara (Hasdani, 2019: 20). Ki Hajar Dewantara atau R.M. Soewardi Soerjaningrat lahir pada 2 Mei 1869 sebagai bangsawan Paku Alam. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara memiliki hak pendidikan yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya, seperti bersekolah di ELS/HIS dan pengajaran budaya dari kalangan keraton (Soewito, 1985; Ora, 2011). Pengajaran yang diberikan keraton tersebut memberikan pengaruh dalam perkembangan pemikirannya.

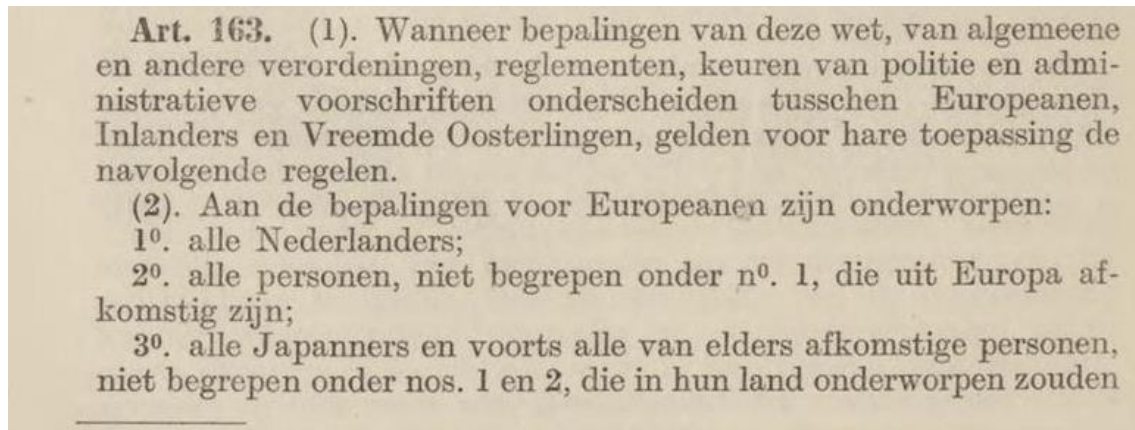
Sistem pendidikan yang diajarkan di keraton menggunakan sistem Pawiyatan. Dimana, sistem pawiyatan berfungsi untuk membentuk karakter para abdi dalem keraton (Hasdani, 2019). Pengajaran yang diberikan meliputi filsafat, sejarah, bahasa, sastra, busana tata krama, tradisi keraton, pusaka, wayang, gamelan, sampai tata ruang yang ada di Keraton (Dwi, 2019). Selain itu, berbagai prinsip dan nilai-nilai budaya Jawa diajarkan pada pendidikan keraton.

Para priyayi akan belajar nilai-nilai budaya Jawa berdasarkan olah rasa dan batin agar terbentuk pribadi yang berbudi luhur. Pembelajaran tersebut akan berfokus pada penekanan prinsip olah rasa/batin (Dewantara, 1984). Prinsip pertama dalam pelajaran yaitu, tentang pembawaan diri dalam kehidupan sosialnya. Kedua adalah keutamaan dalam menjaga kesesuaian perkataan dengan pemikirannya. Prinsip ketiga adalah berbicara secukupnya. Sedangkan prinsip keempat adalah untuk mengontrol sikap agar tidak menimbulkan kesan yang tidak sopan (Hasdani, 2019). Model pengajaran nilai-nilai budaya di Keraton ikut serta dalam membentuk pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara.

Bagi pihak kolonial, budaya yang kuat justru memberikan keuntungan dalam memecah persatuan dalam rakyat pribumi. Paham konservatisme yang ada mendorong masyarakat Jawa untuk mempertahankan budaya dan adat terdahulu seperti hierarki keluarga, peran gender, dan

keterikatan terhadap tradisi. (Suwignyo, 2019: 12). Sehingga, pihak kolonial memanfaatkan budaya tersebut dalam mendekati para penguasa-penguasa lokal (Ricklef, 2008). Dampaknya, bidang-bidang sosial seperti pendidikan dan akses sosial hanya dinikmati oleh kalangan priyayi yang mendominasi struktur kehidupan masyarakat.

Stratifikasi sosial masyarakat Hindia Belanda yang didasarkan pada ras dan keturunan menimbulkan fenomena diskriminasi sosial. Stratifikasi masyarakat Hindia Belanda tertulis dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling stratifikasi sosial seperti dibawah ini:



Gambar 1. Peraturan Stratifikasi Sosial di Hindia Belanda Tahun 1925

Berdasarkan aturan tersebut masyarakat Hindia Belanda digolongkan menjadi tiga kelas sosial, yaitu: (1) kelas atas yang terdiri dari orang-orang Eropa, (2) kelas menengah yang terdiri dari orang-orang Timur Asing seperti Cina, Arab, dan India, serta (3) kelas bawah yang terdiri dari orang-orang pribumi Indonesia asli. Sehingga, berbagai putusan atau pelanggaran yang dilakukan di Hindia Belanda didasarkan pada perbedaan kelas sosialnya. Namun, dalam beberapa kasus para elit pribumi memiliki kedudukan yang hampir setara dengan bangsa Eropa karena kedekatannya dengan para penguasa kolonial (Suwignyo, 2022). Akibatnya, terjadi pemisahan antara kaum priyayi di kelas menengah dan kaum pribumi di kelas bawah yang menyebabkan ketimpangan sosial di Hindia Belanda.

Adanya perbedaan antara kaum pribumi dan kaum priyayi menjadi penghambat dalam mencapai persatuan di Hindia Belanda. Golongan priyayi cenderung memisahkan diri dari kaum pribumi dalam hal pakaian, penggunaan bahasa Belanda, dan memiliki perasaan superioritas (Dewantara, 1977; Hoogervorst, 2017). Sebagai seorang yang berasal dari keluarga bangsawan Pakualam, Ki Hajar Dewantara merasakan perbedaan yang dialami saudara-saudaranya (Soewito, 1985). Dimana sebagian besar nasib rakyat pribumi tidak mendapatkan kesempatan bersekolah, sedangkan lainnya hanya dapat masuk ke Sekolah Angka Dua dengan tingkat pendidikan yang minimum (Niel, 2009: 49). Diskriminasi sosial tersebut membentuk pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mengadvokasi pentingnya pemerataan akses pendidikan dan kesetaraan sosial bagi rakyat pribumi.

Faktor ekonomi memegang peran sentral dalam pembentukan struktur kelas sosial dalam masyarakat pribumi pada periode 1900-1940, setelah faktor keturunan. Pendapatan rakyat pribumi dikelompokkan ke dalam kategori kelas menengah jika berada dalam kisaran 200 hingga 1000 gulden per tahun, sementara kelompok yang memperoleh pendapatan 1000 gulden atau lebih termasuk dalam kelompok elit pribumi yang lebih sejahtera (Hoogervorst, 2017: 451). Kendala pendapatan yang terbatas ini menjadi hambatan bagi kaum pribumi untuk mengikuti tren modernisasi dan mendapatkan pendidikan yang layak, seperti yang dikemukakan.

Ketimpangan sosial semakin diperkuat dengan adanya perbedaan ekonomi antar kelompok di Hindia Belanda. Hal ini juga berkaitan erat dengan perjuangan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mencapai kesetaraan hak dan kesempatan bagi rakyat pribumi. Kesenjangan ekonomi ini menjadi salah satu motivasi yang mendorong Dewantara dalam mengadvokasi

pentingnya pemerataan akses pendidikan dan kesetaraan sosial bagi rakyat pribumi (Dewantara, 1977). Dengan demikian, faktor ekonomi memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk struktur kelas sosial dan mempengaruhi perjuangan Dewantara dalam konteks perubahan sosial dan politik di Hindia Belanda.

Pada awal abad ke-20, perkembangan liberalisme di Hindia Belanda mengubah pola penjajahan menjadi lebih terbuka dan humanis. Kebijakan kolonial berfokus pada kesejahteraan masyarakat pribumi. Pembangunan infrastruktur seperti kantor administrasi, bisnis, bank, jaringan komunikasi, dan pelabuhan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda (Wertheim, 1962). Namun, perkembangan ini juga menghadirkan kekurangan tenaga kerja pada sektor-sektor baru (Meer, 2017: 177). Hal ini menyebabkan kurangnya tenaga kerja pada sektor-sektor baru di Hindia Belanda (Hoogervorst, 2017: 452). Sehingga pemerintah memberikan masyarakat pribumi kesempatan melalui pendidikan.

Pendidikan pada tahun 1900-an diatur berdasarkan jumlah pendapatan keluarga. Biaya sekolah akan dibayarkan satu bulan sekali dengan rincian sebagai berikut:

Table 1. Biaya Pendidikan di Hindia Belanda Pasca Tahun 1900

Kategori pendapatan	Anak pertama dari suatu keluarga	Anak kedua dari suatu keluarga	Anak ketiga dan seterusnya dari suatu keluarga
f 100 - 149	f 1.--	f 0.50	f 0.25
f 50 - 90	f 0.50	f 0.25	f 0.12

Sumber: Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 353 (1903)

Staatsblad No.353 memberikan pengaruh terhadap akses pendidikan pribumi. Peraturan tersebut memberikan keringan biaya sebesar setengah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Apalagi kepada keluarga yang memiliki dua atau tiga anak. Sehingga, pendidikan untuk anak-anak pribumi mengalami peningkatan yang signifikan setelah diterbitkannya peraturan tersebut. Alhasil, meningkatnya lulusan pribumi mengakibatkan berkembangnya pikiran dan kesadaran rakyat.

Kegiatan mengkritisi kebijakan pemerintah dan kondisi sosial Hindia Belanda diinisiasi oleh golongan pemuda pada awal dekade ke-20. Golongan pemuda pribumi yang telah mendapatkan pendidikan Barat ikut memperkuat aksi protes dan kritik melalui lisan maupun tulisan. Beberapa kelompok seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Doewes Dekker, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat (Shiraishi, 1997; Kartodirjo, 2018). Namun, usaha para pribumi dibendung dengan diterbitkannya peraturan Haatzaai Artikelien yang berisi tentang pembatasan berpendapat (Arifin, 2021). Meskipun begitu, kritik-kritik yang disampaikan tidak juga surut, justru perlahan membentuk kesadaran sosial akan persatuan pada masyarakat Hindia Belanda.

Tulisan Soewardi Soerjaningrat berjudul *"Als Ik Een Nederlandse Was"* membuat kekacauan dalam masyarakat Hindia Belanda. Tulisan tersebut berisi tentang kekecewaan yang dirasakannya atas perayaan ulang tahun kemerdekaan Belanda (Soewardi, 1913). Tulisan ini berhasil dicetak dengan jumlah 3000 eksemplar menggunakan bahasa Belanda dan Melayu yang merupakan bahasa sehari-hari saat itu (Hoogervorst, 2017). Akibatnya, Soewardi Soerjaningrat Soerjaningrat dijatuhi hukuman pengasingan untuk meninggalkan Hindia Belanda menurut Aturan Pemerintah no. 47 dengan alasan mengganggu ketertiban umum (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 1913).

Selama dalam pengasingan, Ki Hajar Dewantara aktif dalam berorganisasi dan mengembangkan wawasannya. Soewardi aktif berorganisasi dalam Indische Partij dan Indonesische Persbureau yang didirikannya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi di Hindia Belanda (Soeratman, 1989). Selain itu Soewardi Soerjaningrat membantu menulis di majalah-majalah Belanda, seperti *Koloniaal Weekblad*, mingguan *Indie*, *Nederlandsch Indie*, dan *Wereld Kroniek* (Soewito, 1985). Keaktifannya membuatnya berkorporndensi dengan kelompok-kelompok yang pro terhadap Hindia Belanda. Di samping itu, sebelum kepulangannya Soewardi berhasil menyelesaikan kursus mengajarnya di *Lager Onderwijs*.

Pada tahun 1920-an Hindia Belanda mengalami perkembangan pada bidang sosial. Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi yang memperjuangkan kondisi Hindia Belanda melalui caranya sendiri, seperti *Indische Partij*, Budi Utomo, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam. Fenomena

tersebut memengaruhi Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan, yaitu Taman Siswa. Selain itu, Taman Siswa didirikan sebagai alternatif pendidikan kolonial yang memfokuskan pada pendidikan lahir-batin anak.

Pendirian Taman Siswa tidak lepas dari peran dan pengaruh teman-teman Soewardi dalam forum Selasa Kliwon. Sebagian besar pendiri dan pengurus utama Taman Siswa adalah anggota forum ini, seperti Prawiro Wiworo, Sutatmo Suryokusumo, Suryoputro, dan Pronowidigdjo (Dewantara, 1989; Taman Siswa, 1952). Forum diskusi ini yang memberikan saran dan dukungan kepada Soewardi dalam memperjuangkan pendidikan pribumi. Bahkan, bergantinya nama menjadi Ki Hajar Dewantara disebabkan oleh R.M.A Sutatmo yang sering memanggilnya dengan sebutan Ki Ajar, karena kemampuannya dalam bidang pengajaran yang lebih unggul dari anggota Selasa Kliwon lainnya (Dewantara, 1989). Berdasarkan dinamika kehidupannya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak dapat dilepaskan dari aspek struktur sosial yang ada.

3.2. Kondisi Pendidikan di Hindia Belanda Tahun 1900-1942

Kemajuan pendidikan di Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari pengaruh gagasan liberalisme yang berkembang antara akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Liberalisme berasal dari arti kata kebebasan (*liberty*) dan kesamaan (*equality*) sehingga memunculkan gagasan-gagasan bercorak kemanusiaan (Surya, 2021). Keputusan Reorganisasi Pendidikan No.123 tahun 1892 yang didasarkan pada kemanusiaan memberikan kesempatan bersekolah untuk pribumi. Akhirnya, pendidikan di Hindia Belanda mengalami kemajuan yang cukup signifikan setelah masuknya paham liberalisme (Tabel 2).

Table 2. Jumlah Siswa di Hindia Belanda tahun 1867-1877

Daerah	Jumlah Siswa di Hindia Belanda		
	1867	1873	1877
Jawa dan Madura	5.501	5.579	12.523
Luar Jawa dan Madura	1.864	12.337	13.613
Total	6.865	17.916	26.136

Sumber: Algeemen 1873-1877 (1880) & Verslag (1867)

Pendidikan yang diselenggarakan erat kaitannya dengan kepentingan politik yang digunakan pemerintah kolonial Belanda. Pembangunan infrastruktur yang meningkat menyebabkan kurangnya tenaga kerja pada berbagai sektor di Hindia Belanda (Wertheim, 1962; Hoogervorst, 2017). Alhasil, pendidikan pribumi saat itu diperuntukkan mencetak tenaga kerja yang terampil untuk menghadapi tantangan tersebut (Daliman, 2012). Meskipun terdapat perkembangan dalam sistem pendidikan bagi masyarakat pribumi, namun nilai-nilai pendidikan masih ditentukan oleh kebijakan politik pendidikan kolonial Belanda.

Penerapan gradualisme dalam pendidikan di Hindia Belanda membatasi akses pendidikan bagi pribumi. Pada awal abad ke-19, anak-anak Indonesia tidak mendapatkan perhatian yang memadai, meskipun terdapat beberapa peraturan yang menjanjikan dan menekankan pentingnya memajukan pendidikan bagi pribumi (Nasution, 2012). Baru pada tahun 1848, bantuan pendidikan mulai dirasakan dengan adanya alokasi dana untuk mendidik pengawas perkebunan pemerintah (Daliman, 2012). Pada tahun 1863, pemerintah kolonial hanya memiliki 52 sekolah di Jawa untuk populasi 25 juta penduduk, dan hanya 8 sekolah di luar Jawa (Niederländisch-Indien, 1895). Kemudian pada awal abad ke-20 Politik Etis menaruh perhatian terhadap pendidikan pribumi, meskipun majunya pendidikan dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah.

Seiring dengan majunya pendidikan kolonial, pemerintah menerapkan prinsip konkordansi yang bertujuan mencapai penyeragaman kurikulum. Meskipun, pada kenyataannya justru memperkuat ketidaksetaraan pendidikan antara pribumi dan Belanda (Nasution, 2012).

Meskipun ada perkembangan dalam sistem pendidikan bagi masyarakat pribumi, namun nilai-nilai pendidikan lebih memprioritaskan kebutuhan pendidikan anak-anak Belanda. Prinsip konkordansi ini juga mengabaikan kebutuhan dan kebudayaan Indonesia, dengan mengabaikan penggunaan bahasa Melayu di HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*) dan HCS (*Hollandsche Chineesche School*) (Nasution, 2012). Akibatnya, penggunaan budaya yang tidak sesuai dengan kondisi dan

kebudayaan anak membuatnya dari dunianya. Model pendidikan seperti ini dikecam Ki Hajar Dewantara melalui tulisannya sebagai berikut (Dewantara, 1977: 333):

“Orang Barat itu umumnya bangsa intelek yang mementingkan fikiran atau mengutamakan syarat berjenis-jenis daripada harmoninya, Sedangkan orang Timur ada sebaliknya.”

Prinsip gradualisme dan konkordansi yang diterapkan pemerintah memengaruhi Ki Hajar Dewantara dalam merumuskan Pendidikan Merdeka. Pendidikan yang dimaksudkan seharusnya hanya untuk mengembangkan aspek lahir dan batin anak tanpa melalui kepentingan-kepentingan pihak ketiga (Dewantara, 1977). Sebaliknya, pendidikan kolonial membatasi mobilitas vertikal pribumi melalui pendidikan. Apalagi diskriminasi yang terjadi pada pendidikan kolonial sepenuhnya akan merugikan pendidikan untuk rakyat pribumi.

Sistem pendidikan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 menunjukkan ciri dualisme yang kuat. Terdapat pemisahan yang jelas antara sekolah Belanda dan sekolah pribumi, baik dalam hal inspeksi, kurikulum, bahasa pengantar, maupun pembiayaan (Staatsblaad, 1895; Reoriesantie, 1893). Anak-anak Belanda dari golongan sosial tinggi masuk ke sekolah Belanda kelas satu (ELS), sementara anak-anak Belanda dari golongan rendah masuk ke sekolah Belanda bukan kelas satu (ELS). Ki Hajar Dewantara menyadari ketidakadilan dalam pendidikan antara yang diterimanya dengan pribumi terima (Soewito, 1983). Dimana anak-anak pribumi seusianya hanya dapat bersekolah di Sekolah Kelas Dua atau Desa. Sedangkan, Ki Hajar Dewantara bersekolah di Sekolah Kelas Satu dan mendapatkan pendidikan khusus dari keraton (Hasdani, 2019: 18).

Pendidikan di Sekolah Kelas Satu/HIS memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan Sekolah Kelas Dua. Di Sekolah Kelas Satu, siswa akan mempelajari mata pelajaran seperti matematika, ilmu sosial, ilmu alam, dan bahasa Belanda maupun Perancis (Niederländisch-Indien, 1895; Nasution, 2012). Selain itu, kurikulum di Sekolah Kelas Satu dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Hal ini memastikan bahwa lulusan dari sekolah ini memiliki kemampuan intelektual dan keahlian yang berbeda dari masyarakat pribumi lainnya. Kurikulum ini juga berlaku pada ELS dan HCS yang notabene merupakan perpanjangan HIS dengan perbedaan rasial.

Penempatan tenaga pengajar di Sekolah Kelas Satu yang lebih memadai dibandingkan dengan Sekolah Kelas Dua membuat adanya perbedaan kualitas pendidikan. Sekolah Kelas Dua memiliki jumlah pendidik yang tidak sebanding dengan peserta didik yang diajar, sehingga materi ajarnya terbatas pada membaca, menulis, bahasa daerah atau bahasa Melayu, serta pengetahuan tentang empat prinsip dasar matematika (Niederländisch-Indien, 1895; Nasution, 2012). Kurikulum yang sederhana itu tidak mengganggu keadaan sosial karena tidak meningkatkan mobilitas sosial.

Sekolah Kelas Dua tidak akan dapat menyamai Sekolah Kelas Satu karena adanya prinsip konkordansi dan dualisme pendidikan. Bahasa Belanda tidak diajarkan di sekolah Kelas Dua menjadi halangan untuk melanjutkan pelajaran, kecuali melalui Sekolah Normal (Sekolah Guru) yang dibuka pada tahun 1914 (Nasution, 2012). Akibatnya, lulusan sekolah ini memiliki peluang terbatas sebagai pekerja kasar, tenaga administrasi, tenaga teknis, dan tenaga pertanian kelas dua dikarenakan perbedaan materi pengajaran yang diterimanya (Daliman, 2012). Begitu pula pada Sekolah Desa (Volkschool) yang merupakan alternatif dari Sekolah Kelas Dua.

Sekolah Desa di Hindia Belanda merupakan upaya pemerintah untuk menyebarkan pendidikan dengan biaya yang rendah dan merata di kalangan penduduk. Pendirian sekolah ini dipilih sebagai alternatif untuk menghindari biaya yang tinggi sebesar f 417 juta gulden jika Sekolah Kelas Dua dijadikan sekolah umum (Nasution, 2012). Kurikulum yang diterapkan dirancang sesederhana mungkin dengan menekankan pada baca dan tulis. Meskipun tujuan utama sekolah ini adalah memberantas buta huruf di desa-desa terpencil, namun tantangan jumlah lulusan yang terbatas dan penambahan penduduk yang terus meningkat (Daliman, 2012; Nasution, 2012). Meskipun demikian, sekolah ini berhasil berperan sebagai penyebar pendidikan formal dan pengetahuan Barat, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan.

3.3. Pengaruh Pemikiran Tokoh Pendidikan Pembaharu Terhadap Alam Pikir Ki Hajar Dewantara

Pada awal abad ke-20, Ki Hajar Dewantara berkeinginan untuk memajukan pendidikan anak usia dini karena minimnya perhatian dari pemerintah kolonial. Usaha yang dilakukannya antara lain mendirikan Taman Indriya dan menulis di beberapa majalah seperti, Poesara, Wasita, dan Keluarga (Dewantara, 1977). Inti pemikirannya tentang pendidikan anak usia dini adalah keselarasan kodrat anak dan lingkungan yang seimbang, agar anak dapat berkembang secara maksimal (Dewantara, 1977). Pemikiran tersebut diilhami dari gagasan Maria Montessori dan Frederich Froebel yang telah disesuaikan dengan kondisi Hindia Belanda.

Maria Montessori merupakan tokoh pendidikan pembaharu yang fokus pada anak usia dini. Montessori membagi-bagi pendidikan anak berdasarkan usianya melalui pendekatan psikologi (Montessori, 1912). Pendekatan serupa juga diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara di Perguruan Taman Siswa untuk mencapai pendidikan yang optimal bagi anak (Dewantara, 1977). Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan anak-anak dapat dibagi menjadi tiga masa, yaitu a. masa kanak-kanak (1-7 tahun); masa pertumbuhan jiwa dan pikiran (7-14 tahun), dan masa pembentukan budipekerti (14-21 tahun). Pembagian ini terinspirasi oleh Montessori yang menekankan pentingnya pendidikan pada masa anak memasuki usia emas (golden age) yaitu 0-6 tahun (Montessori, 1912). Selain itu, filosofi utama dalam gagasan Pendidikan Merdeka juga terpengaruh oleh Maria Montessori.

Pendidikan Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara menekankan pada perkembangan lahir dan batin anak secara merdeka. Konsep ini sejalan dengan gagasan Maria Montessori yang menekankan kebebasan anak untuk mengembangkan diri melalui pembelajaran yang relevan dengan lingkungan sekitar anak (Dewantara, 1977). Dengan demikian, kemerdekaan anak dalam pembelajaran dapat dicapai melalui metode eksperimen yang berfokus pada penggunaan indera dan gerakan tubuh anak (Montessori, 1912; Dewantara, 1977). Selain mengadopsi gagasan Montessori, Ki Hajar Dewantara juga mempelajari pendekatan dan metode pembelajaran Frederich Froebel.

Penggunaan metode permainan dalam pendidikan Taman Siswa merupakan hasil dari pemahaman mendalam terhadap gagasan Froebel. Menurut Frederich Froebel, pelajaran tentang indera dapat disampaikan melalui permainan anak-anak, sehingga pembelajaran indra menjadi menyenangkan bagi anak (Dewantara, 1977). Ki Hajar Dewantara kemudian mengadaptasi konsep tersebut dengan budaya Indonesia, sehingga dipilih beberapa permainan yang dapat digunakan sebagai metode pembelajaran yang melibatkan perkembangan fisik dan spiritual anak.

Menurut Ki Hajar Dewantara permainan anak-anak yang dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran, seperti permainan sumbar, gateng, unclang untuk melatih ketelitian, kecakapan, dan kejernihan penglihatan. Selain itu, permainan cublak-cublak suweng, kubuk, dan dakon digunakan untuk mengajarkan anak tentang perkiraan dan perhitungan anak. Sementara itu, permainan gobag sodor, raton, obrog, panahan, jamuran, dan sejenisnya yang berupa permainan olahraga, digunakan untuk melatih fisik, kecekatan, dan keberanian anak. Sedangkan permainan mengutas bunga (ngronce), menyulam daun pisang, atau membuat anyaman, digunakan untuk mengajarkan tata tertib dan keteraturan pada anak (Dewantara, 1933). Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Froebel yang mengedepankan keaktifan anak dalam bermain dan belajar dari lingkungan sekitar.

Ki Hajar Dewantara memberikan kebebasan kepada anak-anak dalam proses pembelajaran, namun tetap dengan pengawasan dari para pamong/guru. Kemerdekaan yang dimaksudkan adalah perkembangan lahir dan batin anak sesuai kodratnya agar memiliki budipekerti yang baik (Dewantara, 1933). Oleh karena itu, peran pamong/guru sangat penting sebagai pengawas saat anak-anak menghadapi potensi hal buruk. Selain itu, anak dan guru diwajibkan tinggal dalam satu lingkungan yang sama untuk memaksimalkan pengawasan. Dalam konteks ini, model pendidikan tersebut dirumuskan Ki Hajar Dewantara dengan nama "Perguruan/Paguron".

Gagasan Perguruan/Paguron terilhami oleh pemikiran Rabindranath Tagore mengenai model pendidikan "Asrama" dan "Pondok" yang lebih dulu berkembang di Hindia Belanda. Perguruan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara berfungsi sebagai tempat bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi anak secara fisik dan spiritual (Dewantara, 1977). Di dalam Asrama, anak-anak diberikan kebebasan untuk berkembang tanpa adanya tekanan berlebihan dari para guru

(Tagore, 1958). Konsep pendidikan yang diadopsi oleh Tagore dan Ki Hajar Dewantara memungkinkan siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan minatnya, serta membentuk karakter dan kepribadian yang kokoh.

4. Kesimpulan

Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural di Hindia Belanda pada periode 1922-1942. Struktur sosial masyarakat Hindia Belanda yang didasarkan pada ras dan keturunan menciptakan stratifikasi sosial. Stratifikasi ini memengaruhi berbagai aspek sosial di Hindia Belanda, termasuk ekonomi, hukum, dan pendidikan. Pendidikan pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda ditandai dengan azas konkordansi, konvergensi, dan dualisme. Hal ini mempersulit orang pribumi untuk mencapai mobilitas vertikal dan meningkatkan kesejahteraannya. Kondisi sosio-kultural yang merugikan bagi penduduk pribumi memicu ketidakpuasan di kalangan elit terdidik dan aktivis asing, seperti Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan Indonesia melalui Ki Hadjar Dewantara berkeinginan untuk memajukan pendidikan anak usia dini karena minimnya perhatian dari pemerintah kolonial. Usaha yang dilakukannya dengan mendirikan Taman Siswa dan menulis di beberapa majalah seperti, Poesara, Wasita, dan Keluarga (Dewantara, 1977). Inti pemikirannya tentang pendidikan merdeka dipengaruhi gagasan Maria Montessori, Frederisch Froebel, dan Rabindranath Tagore yang telah disesuaikan dengan kondisi Hindia Belanda.

Daftar Rujukan

- Agung, S. L., & Suparman, T. 2016. Sejarah Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Arifin, Faizal & Hasni, Nadia & Nurlailasari, Ella. (2021). Haatzaai Artikel: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda. 10.15575/hm.v5i1.11971.
- Daliman, A. 2012. Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial Dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda. Yogyakarta: Ombak.
- Dewantara, B. S. 1989. Ki Hajar Dewantara, Ayahku /oleh Bambang Sokawati Dewantara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dewantara, K. H. 1977. Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Dewantara, K. H. 1933. Kitab Soeloeh Pendidikan: Pola-Wasita. Yogyakarta: Madjelis Peroesahaan Kitab Dari Persatoean Taman-Siswa.
- Dewantara, K. H. 1952. "Buku Peringatan Taman-Siswa 30 Tahun, 1922-1952". Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa: Yogyakarta.
- Hoogervorst, Tom & Nordholt, Henk. (2017). Urban Middle Classes in Colonial Java (1900–1942): Images and Language. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*. 173. 442-474. 10.1163/22134379-17304002.
- Kartodirdjo, S. 2018. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta : PT. Bentang Pustaka.
- Meer, Arnout. (2017). Performing Colonial Modernity: Fairs, Consumerism, and the Emergence of the Indonesian Middle Classes. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*. 175-204. 10.1163/22134379-17304015.
- Montessori, M. 1912. *The Montessori Method: Scientific Pedagogy As Applied Child Education In "The Children's Houses", With Additions And Revisions By The Author.* (A. E. George, Trans). Frederick A Stokes Company. <https://doi.org/10.1037/13054-000>.
- Nasution, S. 2015. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Niederländisch-Indien. 1894. Reorganisatie van het Europeesch lager onderwijs in Nederlandsch-Indië : de voorschriften van 1894 met toelichtende circulaire. Batavia.
- Niederländisch-Indien. 1895. Algemeen verslag van het inlandsch onderwijs in Nederlandsch-Indië. Batavia.
- Niel, R. V., Bur Rasuanto, & Zahara Deliar Noer. 2009. Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Nordholt, H. S. (2017). New Urban Middle Classes in Colonial Java: Children of the Colonial State and Ancestors of a Future Nation. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 173(4), 439–441. <http://www.jstor.org/stable/26281611>.
- Panitia Penerbitan Taman Siswa. 1952. "Buku Peringatan Taman-Siswa 30 Tahun, 1922-1952". Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa: Yogyakarta.
- Rahardjo, Suparto, & Aziz Safa. 2020. Ki Hajar Dewantara : Biografi Singkat 1889-1959. Jogyakarta: Penerbit Garasi.
- Ricklefs, M. C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Sajoga. 1952. Riwayat Perjuangan Taman-Siswa 1922 – 1952, Taman Siswa 30 Tahun. Madjelis Luhur Taman Siswa: Yogyakarta.
- Shiraishi, T. 1997. Zaman Bergerak : Radiakalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926. Jakarta: Pustaka Utama.
- Soedibjo, S. A. 1952. Sedikit Tentang Organisasi Taman Siswa, Taman Siswa 30 Tahun. Madjelis Luhur Taman Siswa: Yogyakarta.
- Soewito, I. H. N. H. 1985. Soewardi Soerjaningrat : Dalam Pengasingan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suwignyo, A. 2019. Pendidikan, Kekuasaan, Dan Kolonialisme. Yogyakarta: Selarung Institute.
- Tagore, R. 1958. Asrama Education. Macmillan and Co., Limited.
- Tsuchiya, K. 2019. Demokrasi Dan Kepemimpinan : Kebangkitan Gerakan Taman Siswa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wertheim, W. F., & Giap, T. S. (1962). Social Change in Java, 1900-1930. *Pacific Affairs*, 35(3), 223-247. <https://doi.org/10.2307/2753184>
- White, B.T. (1973). Demand for labor and population growth in colonial Java. *Human Ecology*, 1, 217-236.